

21 KEPENTINGAN PEREMPUAN

Dalam Pemilihan Walikota Makassar 2013

pemilihan walikota Makassar 2013



Pendidikan yang Murah dan Mudah Dijangkau oleh Perempuan Marginal

1

- Jaminan pendidikan gratis untuk perempuan marginal dari SD sampai perguruan tinggi
- Pemerintah kota makassar memastikan tidak ada lagi putus sekolah bagi keluarga perempuan marginal
- Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan bagi kelompok difabel dan kelompok rentan
- Lingkungan pendidikan yang ramah bagi perempuan (tidak ada perbedaan kelas sosial dalam akses pendidikan)
- Menyediakan Bea siswa bagi keluarga tidak mampu
- Memberikan sanksi tegas untuk guru yang terbukti melakukan pungutan liar
- Memasukkan pendidikan ham, gender dan kesehatan reproduksi dalam muatan lokal pada jenjang SLTP di kota makassar
- Memastikan tidak ada pungutan liar bagi ujian paket c dan mempermudah ijin bagi yang ingin menyelenggarakan paket c
- Memastikan tidak ada praktek KKN dalam perekrutan PNS sehingga kelompok perempuan miskin yang tidak mampu membayar dapat mengakses sebagai tenaga pengajar
- Memastikan tenaga honorer perempuan menjadi PNS tanpa diskriminasi
- Mendukung pendidikan informal bagi keluarga miskin yang di kembangkan oleh masyarakat

2

Pelayanan Kesehatan yang Murah dan Mudah diakses, tanpa diskriminasi

- Pelayanan kesehatan mulai dari penyediaan perawatan, fasilitas, obat-obatan, alat terapi yang murah, mudah diakses, memadahi, dan pelayanan yang cepat tanpa diskriminasi
- Tidak ada penolakan pelayanan untuk perempuan marginal
- Biaya pemeriksaan khususnya papsmear dan kesehatan reproduksi untuk kelompok marginal, difabel, dan kelompok rentan lainnya
- Memastikan tidak ada praktek kkn dalam perekrutan pns sehingga kelompok perempuan miskin yang tidak mampu membayar dapat mengakses sebagai tenaga kesehatan
- Pemerintah memberikan Fasilitas kemudahan bagi masyarakat miskin untuk mengakses jamkesmas dan jamkesda dengan prosedur yang mudah
- Pelayanan rumah sakit yang ramah, cepat dan tanpa diskriminasi
- Pelibatan perempuan dan kelompok rentang lainnya dalam menentukan rencana dan keputusan mengenai program kesehatan khususnya kesehatan reproduksi
- Pemerintah menindak tegas dokter dan oknum paramedis yang terbukti melakukan mal praktik
- Pemerintah mengawasi dan menghentikan penyalahgunaan pemberian jamkesmas dan jamkesda kepada masyarakat yang mampu



Penanganan Banjir

3

- Pembangunan dan perbaikan drainase dilingkungan disetiap kelurahan, kecamatan
- Penyediaan tempat penampungan sampah yang memadai diberbagai tempat umum di kota makassar
- Penerapan sanksi tegas bagi yang membuang sampah di sembarangan tempat atau disaluran air
- Pembersihan dan pengerutan kanal di kota makassar
- Melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Tallo, Jeneberang
- Menghentikan Konversi area serapan air untuk pembangunan perumahan maupun industri yang menutup atau menimbun drainase
- Memberikan bantuan dan evakuasi segera kepada masyarakat yang daerah pemukimannya terendam banjir

4

Penanganan Kemacetan dan Penataan Jalan di Kawasan Kumuh

- Perbaikan dan pembangunan jalan-jalan yang rusak di pemukiman kumuh
- Penyediaan jalur khusus untuk pejalan kaki
- Pembatasan kendaraan umum yang sudah tidak layak pakai (berdasarkan tahun keluaran)
- Penertiban lalulintas secara ketat
- Pengenaan pajak progresif bagi pembelian/ kepemilikan kendaraan pribadi yang melebihi satu kendaraan
- Penyediaan halte pemberhentian kendaraan umum

5

Pangan yang Sehat dan Murah

- Menjamin subsidi pangan sehat dan layak konsumsi untuk kebutuhan masyarakat miskin berbasis pada pangan lokal
- Pemerintah memantau harga pangan disetiap pasar/ harga yang tidak bisa dijangkau perempuan marginal
- Menindak tegas penimbungan pangan disaat terjadi krisis pangan dan perayaan hari-hari besar keagamaan
- Pemerintah melindungi dan memfasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran pangan rumah tangga
- Pemerintah menindak tegas distributor yang memasarkan pangan kadaluarsa

6

Penyediaan Lapangan Kerja bagi Perempuan dan Penerapan Standar upah Buruh yang Layak

- Penambahan lapangan pekerjaan yang mudah diakses oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya
- Perlindungan terhadap perempuan dari eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja
- Pemerintah menghentikan dan menindak tegas perusahaan yang memberlakukan outsourcing
- Pemerintah melindungi pekerja perempuan dari diskriminasi atas dasar orientasi seksual
- Tidak membedakan upah buruh perempuan dan laki-laki
- Pengusutan terhadap perusahaan yang masih melanggar hak-hak cuti haid, melahirkan dan menyusui

Jaminan atas Lingkungan yang Bersih

7

- Penyediaan tempat sampah sementara dan tempat pembuangan akhir sampah yang jauh dari pemukiman penduduk dan tidak mengganggu kesehatan
- Pemerintah menyediakan mobil pengangkut sampah dengan bak tertutup
- Penyediaan Instalasi pengolahan limbah rumah tangga, perusahaan, rumah sakit dan hotel yang memenuhi prasyarat lingkungan
- Menolak investasi asing yang merusak lingkungan dan menghancurkan hak-hak maupun kepentingan perempuan serta kelompok rentan lainnya.

KDRT/Kekerasan

8

- Pemerintah terus melakukan sosialisasi tentang Kekerasan Terhadap Perempuan kepada masyarakat dan sanksi yang jelas kepada pelaku kekerasan
- Adanya perlindungan terhadap korban KDRT dan saksi

Keamanan dan Pembatasan Perempuan

9

- Pemerintah harus menjamin keamanan bagi karyawan Perempuan yang pulang malam

Tidak terlibat/dilibatkan dalam Rapat Pengambilan kebijakan

10

- Pemerintah juga harus memperhatikan dan memberikan ruang khusus pada Perempuan marginal dalam pengambilan keputusan

Akses Informasi

11

- Tersedianya informasi yang mudah diperoleh dan dipahami oleh perempuan marginal dan kelompok rentan lainnya (Layanan kesehatan, pendidikan, modal usaha, dan penggunaan anggaran).
- Tersedianya informasi yang luas dan merata terkait soal akses informasi kepemiluan untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya.
- Penyediaan layanan informasi dan pusat-pusat pertemuan yang mudah diakses oleh perempuan marginal dan kelompok lainnya.

Pelayanan Air Bersih

12

- Air mudah diakses, murah, sehat (tidak bau, tidak keruh dan tidak tercemar oleh limbah dan bahan kimia lainnya).
- Penambahan layanan air bersih yang layak bagi kelompok keluarga marginal khususnya wilayah kumuh dan pesisir.
- Pemerintah kota Makassar tidak mengalihkan pengelolaan PDAM kepada perusahaan asing atau perusahaan swasta.
- Pemerintah menjamin agar fasilitas air yang bersih untuk rumah tangga keluarga marginal tidak dialihkan untuk perusahaan industri.
- Transparansi perhitungan dan penggunaan dan pembayaran PDAM.

Perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan

13

Disabilitas

- Adanya peningkatan kapasitas khusus untuk perempuan difabel sesuai kebutuhan sehingga mereka bisa mandiri secara sosial dan ekonomi.
- Menyediakan lapangan kerja dan perlindungan kerja bagi kelompok difabel.
- Menyediakan Fasilitas khusus dan pendamping yang aman dan nyaman untuk difabel di tempat umum, termasuk sekolah, pasar, rumah sakit, bandara, dll
- Penyediaan akses atas keadilan yang ramah, aman, dan nyaman bagi kelompok difabel.
- Alokasi anggaran khusus untuk pemberdayaan difabel bagi kelompok.
- Tidak ada kebijakan difabel dalam mengakses pekerjaan, informasi, modal, dan penggunaan fasilitas publik.

ODHA

- Penyediaan obat-obatan yang gratis, cukup, dan mudah diakses.
- Menyediakan obat ARV khusus ODHA anak gratis dan mudah diakses.
- Perlindungan ODHA dan keluarga dari berbagai resiko penularan HIV dan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan.
- Pemerintah Kota mendukung revisi perda No.4/2010 tentang Penanggulangan HIV & AIDS Prov. Sulsel 2 poin indikator Perda diskriminatif
- Alokasi anggaran khusus untuk pemberdayaan dan kesehatan untuk ODHA.
- Pemerintah menjamin berkumpul dan berserikat bagi ODHA dan kelompok rentan HIV lainnya.

LGBTI (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks)

- Perlindungan terhadap LGBTI dalam menentukan keputusan orientasi seksual dan identitas gender
- Tidak ada kebijakan diskriminasi terhadap LGBTI dalam pemenuhan hak atas: lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dll
- Diberikan kebebasan untuk berorganisasi tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak manapun.

Pekerja Seks Perempuan

- Penyediaan layanan kesehatan, perlindungan hukum dan akses informasi tanpa membedakan tempat membedakan dengan kelompok yang lain.
- Pemerintah menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi Pekerja Seks Perempuan.



Anak Marginal

- Adanya jaminan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan & perlakuan terhadap anak-anak marginal (ODHA-anak, difabel, LGBT, anak Pekerja Seks dan lainnya)
- Penyediaan akses informasi yang layak dan sehat.
- Alokasi anggaran khusus anak kebutuhan anak marginal

Pengusuran 14

- Pemerintah melakukan penataan /tata ruang terhadap kelompok marginal dan kelompok rentan lainnya dengan tidak melakukan pengusuran dengan semena-mena yang tidak berpihak pada kelompok marginal.
- Pemerintah kota Makassar tidak melakukan kekerasan terhadap korban pengusuran.
- Pemerintah tidak melakukan pengusuran diwilayah marginal dan kelompok rentan lainnya, tetapi melakukan penataan kota.

Transportasi publik dan kriminalisasi di tempat publik 15

- Pemerintah menyediakan transportasi umum yang murah, aman dan nyaman bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.
- Adanya transportasi khusus bagi perempuan/Ibu hamil, perempuan marginal dan kelompok perempuan yang berkebutuhan khusus yang mudah, aman, dan nyaman untuk diakses.

Listrik Mahal 16

- Menjamin tidak terjadi kenaikan tarif listrik
- Pemerataan lampu jalan di seluruh kota Makassar mulai di lorong sampai jalan raya/jalan besar
- Tersedianya ruang pengaduan, saran dan kritik terhadap pelayanan listrik
- Penertiban terhadap pemasangan jaringan listrik yang membahayakan keselamatan masyarakat

Penghancuran keberagaman dan Kebijakan-kebijakan yang diskriminatif 17

- Adanya keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah di setiap tempat ibadah
- Ada jaminan keselamatan dan keamanan berbagai kelompok masyarakat untuk mengekspresikan kepentingannya atas dasar agama, suku, ras dan kepercayaan
- Tidak ada lagi kebijakan diskriminatif yang membuka ruang bagi pemaksaan atau kekerasan yang merugikan kepentingan perempuan dan kelompok minoritas lainnya
- Ada pasal-pasal khusus yang mengatur hak dan perlindungan perempuan dan anak kelompok marginal

- Walikota terpilih mendukung revisi Perda AIDS Sul Sel
- Pasal-pasal khusus yang mengatur aktivis HAM HIV
- Pembubaran kelompok yang melakukan kekerasan yang mengatasnamakan agama

Perumahan dan lingkungan yang kumuh 18

- Pemerintah kota menyediakan fasilitas pembuangan sampah
- Tidak memberikan izin kepada investor untuk melakukan pembangunan yang merusak/menghilangkan mata pencaharian perempuan
- Memberikan solusi terbaik terhadap korban pengusuran dengan menyiapkan perumahan yang layak huni dan penataan yang ramah perempuan
- Kota di tata dengan mengacu pada RTRW kota

Modal Usaha 19

- Pemerintah memastikan ada modal usaha yang mudah diakses dan dikelola langsung oleh perempuan
- Mempermudah akses dana KUR bagi perempuan. LBT, ODHA tanpa agunan/jaminan dan memastikan modal yang diberikan tidak bersumber dari dana utang tapi dari dana APBD
- Pemerintah menyediakan pasar khusus yang menjual kerajinan, pangan, dll yang dikelola langsung oleh perempuan

Perlindungan Hukum bagi Perempuan 20

- Tidak adanya perlindungan hukum bagi saksi perempuan dan perempuan pembela HAM/HAP
- Tidak ada ruang pelayanan khusus untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya yang menjadi korban kekerasan seksual dan KDRT
- Kurangnya kapasitas dan kepekaan gender bagi aparat yang menguasai kasus kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya

Pemberantasan Korupsi 21

- Transparansi anggaran-anggaran proyek pemerintah
- Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bisa mencegah korupsi ditingkat kelurahan, kecamatan dan kota
- Tindakan hukum yang tegas dan cepat terhadap pelaku korupsi dana pembangunan, termasuk pemberdayaan perempuan
- Mencopot jabatan aparat pemerintah yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi
- Memberi ruang bagi NGO, LSM dan masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi

